



EKO SUWANTO, S.T., M.Si.
KETUA DPC PDI PERJUANGAN KOTA YOGYAKARTA
KETUA KOMISI A DPRD DIY

MEMBANGUN MASYARAKAT ADIL MAKMUR
LESTARI DAN BERKEADABAN



CALON WALIKOTA
dr. H. HASTO WARDOYO,
Sp. OG (K)

CALON WAKIL WALIKOTA
WAWAN HARMAWAN,
S.E., M.M.

RABU, TANGGAL 27 NOVEMBER 2024
AYO AJAK KELUARGA
DATANG KE TPS DAN COBLOS
dr. H. HASTO WARDOYO, Sp. OG(K)
WAWAN HARMAWAN, S.E., M.M.

WUJUDKAN TRANSPORTASI RAMAH LINGKUNGAN

Pemda DIY Uji Coba Bus Listrik

YOGYA (KR) - Pemda DIY terus berkomitmen untuk mewujudkan transportasi ramah lingkungan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu dengan melakukan uji coba bus listrik sebagai transportasi ramah lingkungan.

YOGYA (KR) - Pemda DIY terus berkomitmen untuk mewujudkan transportasi ramah lingkungan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu dengan melakukan uji coba bus listrik sebagai trans-

portasi ramah lingkungan.

Uji coba tersebut merupakan langkah awal menuju penggunaan transportasi berbasis low emission (emisi rendah) di kawasan Sumbu Filosofi. Tansportasi bus listrik tersebut selain bisa memberikan kenyamanan kepada para penumpang diharapkan bisa mengurangi polusi lingkungan.

“Keberadaan bus listrik diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk menurunkan polusi udara di kawasan yang juga ditetapkan sebagai warisan dunia. Ini adalah energi terbarukan dengan listrik yang perlu diuji coba. Selain bus, pengadaan charger juga harus dipastikan ada. Uji coba bus listrik ini melibatkan penilaian dari berbagai pihak terkait keamanan, kenyamanan dan usia kendaraan,” kata Sekda DIY Beny Suharsono di Pendopo Wiyoto Projo Kompleks Kepatihan, Jumat (22/11).

Beny menambahkan, apabila evaluasi uji coba ini berjalan dengan baik dan hasilnya memuaskan, maka bus listrik akan digunakan secara bertahap. Selain itu, penggunaan energi listrik diharapkan dapat mendorong perubahan menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Dua armada bus listrik yang diujicobakan memiliki kecepatan terbatas maksimal 60 km/jam. Oleh karena itu, masyarakat harus siap dengan perubahan pola pikir terkait kecepatan kendaraan yang lebih rendah. Semua itu merupakan bagian dari desain kendaraan yang mengutamakan emisi rendah dan efisiensi energi.

“Evaluasi sangat penting karena kita akan melihat semua aspek, termasuk seberapa efektif bus listrik ini dalam operasionalnya. Karena menggunakan energi listrik, bus ini tidak bisa melaju lebih cepat dari 60

km/jam. Evaluasi terhadap efektivitas dan daya tahan mesin juga menjadi hal penting dalam tahap ini,” terang Beny, seraya menambahkan, saat ini rute bus listrik belum ditentukan secara pasti, karena masih menunggu hasil evaluasi secara menyeluruh.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY, Wiyos Santoso menjelaskan, biaya pengadaan dua unit bus listrik yang saat ini sedang diuji coba di Yogyakarta berasal dari dukungan Dana Keistimewaan DIY. Adapun untuk total biaya untuk dua unit bus listrik beserta infrastrukturnya mencapai sekitar Rp 7 hingga Rp 8 miliar.

“Harga untuk dua unit bus listrik kemarin sekitar Rp 7,4 miliar yang sudah termasuk chargernya. Pengadaan charger untuk bus listrik ini terpisah dan telah dibangun di area parkir Maguwoharjo, yang kini su-

dah selesai dengan anggaran tersendiri.

Untuk mendukung operasional bus listrik ini, biaya untuk pengadaan listrik dan trafo diperkirakan sekitar Rp 1 miliar rupiah,” jelasnya.

Wiyos mengungkapkan, dengan adanya bus listrik, diharapkan emisi udara di kawasan Sumbu Filosofi dapat dikurangi secara signifikan. Bus listrik ini direncanakan akan beroperasi di area Malioboro, yang menjadi pusat perhatian bagi pariwisata dan merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Bus listrik dapat menempuh jarak antara 250 hingga 300 kilometer sekali pengisian daya.

“Harapannya, dengan menggunakan bus listrik, kita bisa menurunkan emisi di Sumbu Filosofi dan semua bus yang beroperasi di Malioboro akan bebas emisi,” tambah Wiyos. **(Ria)-f**



KR-Riyana Ekawati

Sekda DIY Beny Suharsono saat melakukan uji coba bus listrik.

PELESTARIAN WARISAN DAN CAGAR BUDAYA
20 Objek Bangunan Masuk Tahap Kajian

YOGYA (KR) - Dinas Kebudayaan Kota Yogya sepanjang tahun ini melakukan kajian terhadap 20 objek bangunan dan benda warisan budaya (WB) dan cagar budaya (CB). Hasil kajian menjadi landasan untuk penetapan, pemeringkatan dan atau penghapusan status warisan atau cagar budaya tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogya Yeti Martanti, mengatakan kajian itu untuk memperkuat pelestarian WB dan CB di Kota Yogya. “Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tidak hanya tugas dan kewenangan pemerintah. Tapi sebenarnya juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. WB dan CB menjadi salah satu identitas dan jati diri yang harus dipertahankan,” ungkapnya, Jumat (22/11).

Dalam melakukan kajian terhadap 20 objek bangunan maupun benda WB dan CB, Dinas Kebudayaan Kota Yogya juga melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Yogya. Setiap objek yang direkomendasikan telah melalui kajian yang menyeluruh dalam mempertimbangkan banyak aspek. Baik itu aspek sejarah, sosial maupun budaya yang melekat pada objek-objek bangunan dan benda. “Kami berharap hasil kajian itu dapat menjadi landasan untuk membuat ke-

putusan yang tepat dan bijak dalam penetapan, pemeringkatan maupun penghapusan status warisan budaya dan cagar budaya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Yeti menyatakan dalam proses penetapan, pemeringkatan maupun penghapusan WB dan CB menjadi pencermatan serta pertimbangan masalah pemeliharaan dan sebagainya. Hal-hal itu juga menjadi materi untuk melakukan pencermatan dalam proses penetapan warisan budaya cagar budaya,” terangnya.

Adapun 20 objek WB dan CB yang dikaji adalah Gedung SMAN 11 Yogya, Gedung DPRD DIY, Gedung Museum Sandi, Gedung Apotek Kimia Farma 21 dan 20 di Jalan Malioboro, Gedung Gereja Protestan di Indonesia Barat Marga Mulya, Gedung Masjid Margoyuwono, Gedung Kantor Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Yogyakarta serta Wisma Palapa dan Reformasi Kompleks PPSDM.

Selain itu Eks Depot Es Petodjo di Jalan Mangkubumi dan Jalan Hayam Wuruk, SMPN 3 Yogya, SDN Jetis 1 Yogya, SDN Margoyasan Yogya, rumah tradisional Jawa di Giwangan, Gedoeng Moehammadijah Yogya, sisa pagar keliling Puro Pakualaman serta, Arca Dewi Sri, Serat Ambiya dan wayang kulit Purwa Kumbakarna Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Sementara itu Ketua TACB Kota Yogya Yanuarius Benny Kristiawan, menjelaskan 20 objek dan jenis kajian terdiri dari 16 bangunan, satu struktur dan tiga benda. TACB mengkaji objek dari berbagai aspek antara lain identitas, alamat, status kepemilikan, sejarah dan nilai-nilai penting atau keistimewaan sehingga objek itu layak untuk diajukan sebagai warisan budaya atau cagar budaya tingkat Kota Yogya. “Misalnya SMPN 3 Yogya, bangunan ini penting karena bekas sekolah yang dikhususkan untuk etnis Cina pada tahun 1912. Gedung SDN Jetis 1 Yogya, sekolah ini dulu disebut sekolah pribumi Angka Loro (Sekolah Rakyat) didirikan tahun 1906,” jelasnya. **(Dhi)-f**

Jelang Pilkada, Politik Uang Paling Meresahkan



KR-Juvintarto

Peresmian dengan peninjauan di room Layanan Konsultasi Hukum dan Perpustakaan Bawaslu DIY.

YOGYA (KR) - Jelang Pilkada, kemungkinan pelanggaran politik uang (money politics) dirasa paling meresahkan. Perlu ada patroli pengawasan dan juga edukasi pada masyarakat serta pengawas pemilu yang digencarkan dengan memenuhi hak literasi. Hal itu agar mendapatkan informasi yang tepat seputar pemilu dengan regulasi yang ada.

“Hak literasi kepemiluan adalah hak asasi yang harus dipenuhi Bawaslu,” tegas mantan Ketua Ba-

waslu RI Bambang Eka Cahya Widodo dalam peresmian Layanan Konsultasi Hukum dan Perpustakaan Produk Hukum, Jumat (22/11) di Kantor Bawaslu DIY, Jalan DI Panjaitan, Mantrijeron Yogya.

Bambang menegaskan, dengan literasi yang baik, pelanggaran pemilu yang bisa terjadi karena kesalahan administratif bisa diminimalisir. Demikian juga dengan mengetahui regulasi dan sanksi yang menjerat pelaku politik uang bisa mengantisipasi

terjadinya politik uang dengan ancaman pidana.

“Pelanggaran Pemilu yang banyak terjadi karena ketidaktahuan masyarakat. Seperti misalnya Pemilu diulang karena KPSS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) yang berasal dari unsur masyarakat kurang tidak memahami regulasi,” jelasnya.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bambang didampingi Ketua Bawaslu DIY Drs Mohammad Najib MSI. “Bawaslu DIY sebagai lembaga publik melakukan percepatan pelayanan pada masyarakat dalam konsultasi hukum seputar kepemiluan serta membuka akses yang seluas-luasnya terhadap informasi dan produk hukum Bawaslu,” ucap M Najib dalam sambutannya.

Sutrisnowati menambahkan Bawaslu DIY juga menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat, mudah dan lengkap. **(Vin)-f**